

IMPLEMENTASI PROGRAM KOTA TANPA KUMUH DI KECAMATAN SEMARANG TIMUR

Stevanni Imelda Christianingrum, Titik Djumiarti

Jurusan Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jl. Prof H. Soedarto, S.H Tembalang Semarang Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman : <http://fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id

Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) adalah program yang dijalankan Direktorat Jenderal Cipta Karya guna mendukung pemenuhan target RPJMN 2015 – 2019. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 mengamanatkan pembangunan dan pengembangan kawasan perkotaan melalui penanganan kualitas lingkungan pemukiman. Hasil penelitian menunjukkan Semarang Timur memiliki 6 kelurahan yang masuk dalam kawasan pemukiman kumuh yaitu kelurahan Bugangan, Rejosari, Mlatiharjo, Mlatibaru, Rejomulyo, Kemijen. Program KOTAKU ini mendapatkan dana APBN sebesar 17,2 milyar untuk menjalankan programnya. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi program KOTAKU di Kecamatan Semarang Timur. Terdapat 5 program yang dijalankan, yaitu perbaikan kondisi bangunan gedung, perbaikan jalan lingkungan, penyediaan air minum, pemberian fasilitas pengelolaan sampah, dan penyediaan proteksi kebakaran. Hasil penelitian menunjukkan adanya penurunan luas kawasan pemukiman kumuh dari 415,83 Ha menjadi 118,5 Ha. Implementasi program KOTAKU ini memiliki faktor penghambat, yaitu kurangnya sosialisasi dari pemerintah terkait progra, dan kurangnya partisipasi masyarakat di dalam proses pembangunan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah berjalannya implementasi KOTAKU di Kecamatan Semarang Timur sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat dan terdapat capaian penurunan luas pemukiman kumuh dari 71,5%. Penelitian ini memberikan rekomendasi yaitu, dari pihak pemerintah perlu menambah sosialisasi terkait program dan melakukan koordinasi langsung kepada masyarakat guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berjalannya program KOTAKU. Saran untuk penelitian selanjutnya adalah perlunya strategi dalam sosialisasi yang dilakukan secara bottom up agar semakin banyak masyarakat yang terlibat aktif.

Kata Kunci : Implementasi Program, Faktor Implementasi, Kualitas Lingkungan

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF KOTA TANPA KUMUH (KOTAKU) PROGRAMME IN EAST SEMARANG DISTRICT

Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) is a programme runned by the Direktorat Jenderal Cipta Karya to support the fulfillment of the RPJMN targets for 2015 - 2019. Presidential Regulation No. 2 of 2015 mandates the construction and development of urban areas through the handling of the residential environments quality. The results of the study shows that East Semarang has 6 urban village that are included in the slum area, namely Bugangan, Rejosari, Mlatiharjo, Mlatibaru, Rejomulyo, Kemijen. KOTAKU programme gets APBN found of 17,2 billion to run the program. Through a qualitative-descriptive approach, this study aims to find out how the implementation of the Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) in the District of East Semarang. There are 5 programmes has to be implemented, namely improvement of building conditions, improvement of environmental roads, provision of drinking water, provision of waste management facilities, and provision of fire protection. The results of the study showed that there was a reduction in the size of the slum area from 415.83 Ha to 118.5 Ha. The implementation of the KOTAKU programme has an inhibiting factor, such as the lack of socialization from the government related to the program in community, and the lack of community participation in the development process. The conclusion of this study is the implementation of KOTAKU in East Semarang has been in accordance with the needs of local community and there was a reduction in the size of slum area 71,5%. This study provides recommendations that, from the government perspective it is necessary to increase socialization related to the program and to coordinate directly with the community to increase participation in the KOTAKU programme. The suggestion for further research is the need for a strategy in socialization carried out bottom-up so that more people are actively involved.

Keyword : Programme Implementation, Implementation Factor, Environmental Quality

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia, pertumbuhan penduduk merupakan suatu permasalahan publik yang menimbulkan dampak, yaitu salah satunya sulitnya pemenuhan tempat tinggal yang layak bagi penduduk. Hal ini disebabkan karena terbatasnya wilayah perkotaan untuk dilakukan pembangunan pemukiman yang layak. Kondisi seperti ini sangat banyak dijumpai khususnya di wilayah perkotaan.

Penduduk yang semakin bertambah disertai arus urbanisasi yang tinggi menyebabkan penyediaan sarana pemukiman menjadi semakin mendesak. Tingginya harga tanah di perkotaan serta rendahnya pendapatan perkapita menyebabkan masyarakat cenderung mencari areal pemukiman di daerah pinggiran kota dengan lingkungan yang tidak memadai serta sarana prasarana penunjang yang sangat minim.

Daerah pemukiman yang tidak memiliki prasarana yang memadai akan menimbulkan berbagai

masalah, baik ditinjau dari segi kesehatan, keindahan dan kenyamanan. Pada dasarnya suatu permukiman kumuh terdiri dari beberapa aspek penting, yaitu tanah/lahan, rumah/perumahan, komunitas, sarana dan prasarana dasar, yang terajut dalam suatu sistem sosial, sistem ekonomi dan budaya baik dalam suatu ekosistem lingkungan permukiman kumuh itu sendiri atau ekosistem kota.

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 mengamanatkan pembangunan dan pengembangan kawasan perkotaan melalui penanganan kualitas lingkungan permukiman, yaitu peningkatan kualitas permukiman kumuh, pencegahan tumbuh kembangnya permukiman kumuh baru, dan penghidupan yang berkelanjutan.

Guna mengurangi kawasan pemukiman kumuh tersebut, pemerintah pusat membuat suatu program yang bernama Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Program ini sudah dijalankan oleh

Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta beberapa daerah di Indonesia, diantaranya kota Surabaya, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Bengkalis di Riau, dan Provinsi Jawa Tengah. Program Kota Tanpa Kumuh Muncul di tahun 2016 setelah beberapa kali mengalami revisi yang diakibatkan karena terus meningkatnya wilayah pemukiman kumuh.

Program KOTAKU mendukung Pemerintah Daerah sebagai pelaku utama penanganan permukiman kumuh dalam mewujudkan permukiman layak huni. Program KOTAKU meliputi perbaikan infrastruktur yang dinilai tidak layak berdasarkan 7 parameter kumuh, yaitu dilihat dari kondisi bangunan gedung, indikator jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase, pengelolaan air limbah, kondisi pengelolaan sampah, dan proteksi kebakaran. Jika dalam suatu wilayah terdapat salah satu indikator tersebut maka program KOTAKU akan memperbaiki melalui program yang dibutuhkan.

Sesuai dengan tujuan program, penanganan permukiman kumuh yang dimaksud dalam Program KOTAKU tidak hanya mengatasi kekumuhan yang sudah ada, namun juga untuk mencegah tumbuhnya kekumuhan baru. Cakupan kerja penanganan permukiman kumuh dalam Program KOTAKU berdasarkan kondisi kualitas permukiman yang ada dapat dibedakan menjadi tiga pola penanganan, yang mengacu kepada Undang-Undang No. 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, yaitu: pencegahan, Peningkatan Kualitas, dan pengelolaan.

Dalam RPJMN 2015-2019 disebutkan bahwa salah satu sasaran pembangunan kawasan permukiman adalah tercapainya pengentasan permukiman kumuh perkotaan menjadi 0 (nol) hektar melalui penanganan kawasan permukiman kumuh. Kawasan pemukiman kumuh di Kota Semarang mencapai 415,83 hektar yang tersebar dalam 62 kelurahan di 15 Kecamatan, diantaranya Kecamatan Tugu,

Genuk, Semarang Barat, Semarang Tengah, Semarang Timur, Semarang Utara, Candisari, Pedurungan, Semarang Selatan, Tembalang, Gayamsari, Mijen, Banyumanik, Gunungpati, dan Ngaliyan.

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor 050/801/2014 tentang penetapan lokasi lingkungan perumahan dan pemukiman kumuh di Kota Semarang, luas pemukiman kumuh di Semarang Timur mencapai 49,47 hektar yang tersebar di 6 Kelurahan meliputi Kelurahan Bugangan, Rejosari, Mlatiharjo, Mlatibaru, Rejomulyo, dan Kemijen.

Tabel 1.3
Jumlah Lokasi Kawasan Kumuh di Kecamatan Semarang Timur

| Nama Kelurahan | Jumlah Lokasi Kawasan Kumuh |
|----------------|-----------------------------|
| Bugangan | 21 |
| Kemijen | 37 |
| Mlatibaru | 10 |
| Mlatiharjo | 24 |
| Rejomulyo | 15 |
| Rejosari | 13 |

Sumber: Dokumen luas lokasi kumuh Semarang Timur 2018
Dalam pencapaian program penanggulangan kawasan kumuh perkotaan, kecamatan Semarang Timur menerapkan target yang

dikenal dengan target seratus kosong seratus (100 0 100). Maksud dari target seratus kosong seratus yaitu 100% akses air bersih, 0% kawasan kumuh, dan 100% sanitasi yang baik. Melalui target tersebut diharapkan kedepannya pemukiman kumuh di wilayah Semarang Timur bisa berkurang dan terjadi peningkatan kualitas pemukiman menjadi lebih baik.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kecamatan Semarang Timur?
2. Apa faktor penghambat dan faktor pendukung dalam rangka perwujudan implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui implementasi program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) sebagai upaya pemerintah untuk mengurangi tingkat kemiskinan khususnya di Kota Semarang Kecamatan Semarang Timur.
2. Mengetahui faktor apa saja yang menghambat dan pendukung dari

implementasi Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU).

D. Kajian Teori

Administrasi Publik

Chandler & Plano (dalam Keban, 2008: 3), mengatakan bahwa Administrasi Publik adalah proses dimana sumber daya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola (manage) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. Menurut Dwight Waldo (dalam Syafii, 2006: 25) administrasi publik adalah manajemen dan organisasi dari manusia-manusia dan peralatannya guna mencapai tujuan pemerintah. Menurut Edward H. Litchfield (dalam Syafii, 2006: 25) administrasi publik adalah suatu studi mengenai bagaimana bermacam-macam badan pemerintahan diorganisasikan, dilengkapi dengan tenaga-tenaganya, dibiayai, digerakkan dan dipimpin.

Leonard D. White (dalam Indiahono, 2009: 3) merupakan orang yang

pertama kali memperkenalkan administrasi publik, ia meyakinkan bahwa ada empat asumsi dasar dari administrasi publik, yaitu (1) administrasi adalah suatu kesatuan proses yang dapat dipelajari secara seragam di pemerintah pusat, negara dan tingkatan lokal; (2) dasar dari studi adalah manajemen, bukan hukum; (3) administrasi adalah bagian dari seni, tetapi transformasi ideal dari ilmu adalah memenuhi dua hal, yaitu mungkin dan bermanfaat; (4) pengenalan administrasi, bahwa administrasi telah menjadi dan akan terus berkembang sebagai kajian yang membahas permasalahan dalam pemerintahan modern.

Berdasarkan pendapat para ahli mengenai definisi administrasi publik di atas, dapat dipahami bahwa administrasi publik adalah kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang atau lembaga dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dalam memenuhi kebutuhan publik secara efisien dan efektif.

Kebijakan Publik

Menurut Dunn (dalam Keban, 2008: 67), dalam rangka pembuatan suatu

kebijakan publik ada beberapa tahapan penting, yaitu agenda kebijakan (agenda setting), formulasi kebijakan (policy formulation), implementasi kebijakan (policy implementation), dan penilaian kebijakan (policy assessment). William N. Dunn (1994) dalam bukunya Pengantar Analisis Kebijakan Publik, mengatakan bahwa kebijakan publik adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintah, seperti pertahanan, keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan dan lain-lain. Menurut James Anderson dalam bukunya Public Policy Making (2010 : 42) mengatakan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud/tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan.

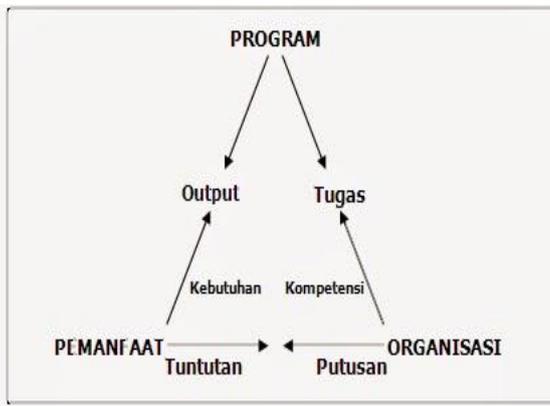
Menurut William N. Dunn (1994: 17) di dalam proses kebijakan publik terdapat tahap – tahap yang dilalui, yaitu sebagai berikut:

1. Tahap Penyusunan Agenda
2. Tahap Formulasi Kebijakan
3. Tahap Adopsi Kebijakan
4. Tahap Implementasi Kebijakan
5. Tahap Evaluasi Kebijakan

Implementasi Kebijakan

Merilee S. Grindle (dalam Pasolong, 2007: 57) mengemukakan bahwa implementasi sering dilihat sebagai suatu proses yang penuh dengan muatan politik dimana mereka yang berkepentingan berusaha sedapat mungkin mempengaruhinya. Hingis (dalam Pasolong, 2007: 57) mendefinisikan implementasi sebagai rangkuman dari berbagai kegiatan yang didalamnya sumberdaya manusia menggunakan sumberdaya lain untuk mencapai sasaran strategi. Bernadini R. Wijaya & Susilo Supardo (dalam Pasolong, 2007: 57) mengatakan bahwa implementasi adalah proses menginformasikan suatu rencana ke dalam praktik. Salah satu model implementasi program yakni model yang

diungkapkan oleh David C. Korten. Model ini memakai pendekatan proses pembelajaran dan lebih dikenal dengan model kesesuaian implementasi program.



Sumber:
David C.Korten (Tarigan, 2009)

Korten menggambarkan model ini berintikan tiga elemen yang ada dalam pelaksanaan program, yaitu program itu sendiri, pelaksanaan program, dan kelompok sasaran program. Korten menyatakan bahwa suatu program akan berhasil dilaksanakan jika terdapat kesesuaian dari tiga unsur implementasi program. Pertama, kesesuaian antara program dengan pemanfaat, yaitu kesesuaian antara apa yang ditawarkan oleh program dengan apa yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran (pemanfaat). Kedua, kesesuaian antara program dengan

organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara tugas yang disyaratkan oleh program dengan kemampuan organisasi pelaksana. Ketiga, kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara syarat yang diputuskan organisasi untuk dapat memperoleh output program dengan apa yang dapat dilakukan oleh kelompok sasaran program.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif. Menurut Sugiono (2009: 15), metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositifisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan dengan triangulasi (gabungan) analisis data yang bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna daripada generalisasi. Sampel Kepala Bidang

Perencanaan Pengembangan Wilayah BAPPEDA Kota Semarang, Kepala Bidang Program dan Pembangunan Kecamatan Semarang Timur, Fasilitator Program KOTAKU, Asisten *urban planner* Kota Semarang, dan warga penerima program KOTAKU. Teknik analisis yang dilakukan yaitu: Teknik analisis data yang digunakan, yaitu: 1). reduksi data, 2) display data, dan 3) keputusan dan verifikasi.

2. HASIL DAN PEMBAHASAN

2.1 Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh Kecamatan Semarang Timur

Berdasarkan teori kesesuaian implementasi program menurut David C.Korten, suatu program dikatakan berhasil jika terdapat 3 kesesuaian, yaitu kesesuaian program dengan sasaran, kesesuaian program dengan pelaksana program, serta kesesuaian kelompok sasaran dengan kelompok pelaksana program.

Ditinjau dari aspek kesesuaian program dengan sasaran, implementasi program ini merupakan kesesuaian antara apa yang ditawarkan oleh program dengan apa yang dibutuhkan oleh kelompok

sasaran. Kelompok sasaran yang dimaksudkan adalah warga Kecamatan Semarang Timur yang rumahnya masuk dalam indikator perumahan kumuh. Permasalahan yang ada dalam masyarakat, yaitu kurangnya pemenuhan pemukiman yang layak huni, dengan munculnya program KOTAKU maka permasalahan tersebut dapat diatasi dengan adanya perbaikan infrastruktur di permukiman sehingga indikator permukiman kumuh dapat berkurang.

Guna mencapai sasaran maka program KOTAKU diprioritaskan pada 5 program yang diterapkan di wilayah Kecamatan Semarang Timur meliputi: 1) program perbaikan kondisi bangunan untuk pemenuhan rumah layak huni. Program tersebut dijalankan di Kelurahan Bugangan dan Kelurahan Kemijen. Alasan utama pemilihan lokasi karena sebagian rumah warga di sana memiliki lokasi yang lebih rendah daripada jalan lingkungan di sekitarnya sehingga jika turun hujan maka air akan langsung masuk ke dalam rumah. 2) program perbaikan jalan lingkungan untuk pemenuhan

kualitas lingkungan. Program ini dijalankan di Kelurahan Rejosari dan Rejomulyo dengan alasan daerah tersebut jalannya masih rendah yang mengakibatkan rob. 3) program penyediaan air minum untuk pemenuhan kebutuhan air masyarakat. Program ini dilaksanakan di Kelurahan Mlatiharjo dan Kelurahan Mlatibaru dengan alasan daerah tersebut merupakan daerah yang memiliki air asin yang tidak layak jika digunakan untuk air minum. 4) program pemberian fasilitas pengelolaan sampah yaitu pemberian tong sampah. Program ini diterapkan di semua Kelurahan di Kecamatan Semarang Timur. Alasan utama program ini karena mayoritas masyarakat kurang peduli kondisi tempat sampah. Program ini diharapkan masyarakat yang tadinya tidak memiliki tempat untuk membuang sampah terbantu dengan pengadaan tong sampah di setiap kelurahan sebagai upaya pemenuhan pemeliharaan lingkungan sehingga terwujud masyarakat yang bersih dan rapi. 5) program penyediaan proteksi kebakaran yang dilakukan di semua

Kelurahan di Kecamatan Semarang Timur. Tujuan utama program ini sebagai upaya pencegahan terjadinya kebakaran, sehingga bisa menjadi langkah preventif. Beberapa program ini senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Donny Wahyu Wijaya (2016) yang menyimpulkan bahwa dalam rangka penanganan kawasan permukiman kumuh dilakukan beberapa strategi berupa meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan, sertameningkatkan sosialisasi sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat.

Ditinjau dari aspek kesesuaian program dengan pelaksana, implementasi program ini merupakan kesesuaian tugas yang diisyaratkan oleh program dengan kemampuan organisasi pelaksana. Sebuah program tentunya membutuhkan kemampuan sumber daya manusia yang kompeten agar program tersebut dapat berjalan dengan baik. Dalam hal ini, sumber daya manusia yang mendukung adalah pihak pemerintahan dan fasilitator program KOTAKU. Program KOTAKU mendapat

dukungan yang penuh dari pemerintah Kota mulai dari tahap perencanaan hingga tahap keberlanjutan.

Berdasarkan hal ini, program KOTAKU sudah diimplementasikan dengan baik, terbukti dengan adanya peran baik dari pemerintah kota yang dimulai dari proses perencanaan yang dikonsultasikan kepada aparat pemerintah melalui satker PIP Kota. Selanjutnya dari proses pelaksanaannya yang sebagian dananya dibiayai oleh APBD Kota untuk kebutuhan masing – masing kelurahan. Pemerintah kota juga menyiapkan sebuah kegiatan evaluasi bersama mengenai capaian penanganan kumuh di kota Semarang melalui program KOTAKU. Hal ini juga dibuktikan dengan berkurangnya luas area permukiman kumuh dari 415,83 Ha menjadi 118,5 Ha.

Ditinjau dari aspek kesesuaian kelompok sasaran dengan pelaksana merupakan kesesuaian antara syarat yang diputuskan organisasi untuk dapat memperoleh output program dengan apa yang dapat dilakukan oleh kelompok sasaran.

Implementasi pogram KOTAKU dapat berjalan dengan baik jika terdapat kerjasama antara masyarakat dan pihak pelaksana mulai dari tahap persiapan hingga tahap keberlanjutan. Hal ini pihak pelaksana yang dimaksudkan adalah aparat pemerintah, yaitu Lurah, ketua RT, dan pihak fasilitator.

Implementasi program KOTAKU dalam hal ini sudah dapat dikatakan berhasil karena terdapat keterkaitan antara kelompok sasaran dengan pelaksana program. Namun dalam kenyataannya, peran serta masyarakat masih rendah. Hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi pemerintah terkait program di lingkungan tempat tinggal mereka sehingga banyak warga yang belum mengetahui.

Ditinjau dari tahapan kegiatan program, maka terdapat 5 tahapan kegiatan yang dilakukan dalam program KOTAKU, yaitu: tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta tahap keberlanjutan. Pertama, Tahap Persiapan: Terdiri dari 3 kegiatan, yaitu penyiapan tim fasilitator, kemudian proses sosialisasi program

KOTAKU kepada kelurahan – kelurahan yang ada yang kemudian diadakan program pelatihan mengenai pengembangan kapasitas masyarakat tentang lokasi kumuh dan pencegahannya. Kedua, tahap perencanaan: Tahap perencanaan meliputi penyelesaian rencana penataan lingkungan pemukiman, kemudian kegiatan review sinkronisasi rencana teknis kawasan prioritas dengan rencana aksi penanganan kawasan kumuh dan kemudian dilanjutkan dengan kegiatan pemetaan masalah serta penyusunan rencana kerja.

Ketiga, Tahap Pelaksanaan: Pada tahap pelaksanaan akandiadakan sosialisasi tentang pelaksanaan kegiatan kepada masyarakat serta monitoring pelaksanaan pekerjaan fisik. Selain itu juga aka ada serah terima dana yang akan digunakan untuk pembangunan proyek. Keempat, Tahap Pengawasan: pada tahap ini terdapat kegiatan monitoring serta evaluasi triwulan pencapaian kinerja. Para fasilitator akan mengadakan evaluasi pencapaian kinerja dengan dinas Kota terkait capaian triwulan.

Kelima, tahap keberlanjutan: setelah semua tahap berjalan, di tahap akhir ini terdapat kegiatan yang fokusnya adalah pemeliharaan dari program yang telah dicapai. Selain itu juga terdapat fasilitasi pembentukan forum kemitraan di tingkat kecamatan.

2.2 Faktor Pendorong dan Penghambat Implementasi Program KOTAKU.

Menurut Mazmanian (dalam Wahab, 2008: 69) terdapat 3 faktor keberhasilan suatu implementasi yaitu karakteristik dari masalah, karakteristik dari kebijakan, dan faktor lingkungan. Berdasarkan masing – masing faktor tersebut, terdapat indikator yang nantinya akan dikaji dalam implementasi program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU).

Pertama, Masalah yang terjadi dalam pengimplementasian program KOTAKU

Faktor karakteristik masalah yang terkait dengan program ini yaitu tingkat kesulitan teknis dari masalah yang ada, tingkat kemajemukan kelompok sasaran, dan cakupan perubahan perilaku masyarakat yang

diharapkan. Kesulitan teknis dari pengimplementasian program KOTAKU adalah kurangnya partisipasi masyarakat secara aktif pada saat proses pendataan kawasan lingkungan dikarenakan kurangnya sosialisasi dari pihak pemerintah terkait adanya program KOTAKU. Selanjutnya adalah tingkat kemajemukan kelompok sasaran, di dalam pengimplementasian program KOTAKU terdapat 5 program yang dilaksanakan di kawasan Kecamatan Semarang Timur. Program tersebut dialokasikan secara menyeluruh dengan skala prioritas sesuai kondisi dan kebutuhan. Menyadari masyarakat Kecamatan Semarang Timur yang heterogen maka pihak pelaksana juga mensikapi kemajemukan kelompok sasaran. Hal ini memberi arti bahwa program KOTAKU diterapkan dengan melihat kemajemukan kelompok sasaran. Selanjutnya adalah cakupan perilaku masyarakat yang diharapkan dalam pengimplementasian program KOTAKU. Di Kecamatan Semarang Timur terdiri dari masyarakat yang heterogen yang menyebabkan perbedaan pola berpikir antara satu

dengan yang lainnya. Selain memiliki pola pemikiran yang berbeda juga memiliki tingkat kesibukan yang berbeda yang berpengaruh terhadap partisipasi dalam berlangsungnya program KOTAKU.

Kedua, Masalah konten dan konteks kebijakan yang terjadi dalam pengimplementasian program KOTAKU yang meliputi kejelasan isi kebijakan dan alokasi sumber daya.

Program KOTAKU meliputi perbaikan infrastuktur yang dinilai tidak layak berdasarkan 7 parameter kumuh, yaitu dilihat dari kondisi bangunan gedung, indikator jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase, pengelolaan air limbah, kondisi pengelolaan sampah, dan proteksi kebakaran. Berdasarkan tujuh parameter pemukiman kumuh tersebut maka terbentuk sebuah program KOTAKU dengan 7 kegiatan. Setelah diadakan survey dan pendataan wilayah di Kecamatan Semarang Timur, terdapat 5 program yang diimplementasikan di Kecamatan Semarang Timur, yaitu

perbaikan kondisi bangunan gedung untuk pemenuhan kebutuhan rumah layak huni, perbaikan jalan lingkungan untuk pemenuhan kualitas lingkungan, penyediaan air minum untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat, pemberian fasilitas pengelolaan sampah untuk pemenuhan pemeliharaan lingkungan, dan penyediaan proteksi kebakaran untuk pemenuhan penyedia sarana kebakaran. Program KOTAKU mendapatkan dana dari APBN sebesar 17,2 milyar di tahun 2017. Dana tersebut digunakan sebagai pendukung pekerjaan proyek yang dilakukan di masing – masing Kecamatan. Selain sumber daya finansial juga dibutuhkan sumber daya manusia sebagai penunjang keberhasilan implementasi yang terdiri dari pihak masyarakat dan aparat pemerintahan.

Ketiga, Masalah kondisi lingkungan dalam pengimplementasian program KOTAKU

Kondisi lingkungan yang dimaksudkan dalam pengimplementasian program KOTAKU adalah keadaan masyarakat sebagai penerima

program sekaligus aktor yang memberikan dukungan terhadap berjalannya program KOTAKU.

Kondisi masyarakat yang mayoritas sebagai pegawai di berbagai bidang, memberi dampak negative terhadap pelaksanaan program KOTAKU sehingga menjadi rendah karena harus membagi waktu bekerja dan gotong royong pembangunan program di wilayahnya. Hal ini juga diperparah dengan minimnya sosialisasi terhadap masyarakat sehingga sebagian besar masyarakat menjadi kurang peduli terhadap sebuah program yang ada di kawasan pemukiman tempat mereka tinggal.

Konsekuensi dari kurangnya sosialisasi program KOTAKU sehingga sebagian masyarakat lebih memilih fokus bekerja dibandingkan ikut dalam pembangunan pemukiman di daerahnya. Hanya ada sebagian masyarakat yang mau meluangkan waktunya untuk turut terlibat dalam program KOTAKU di daerahnya.

3. PENUTUP

3.1 Kesimpulan

- a. Implementasi Program KOTAKU di Kecamatan Semarang Timur.
1. Kesesuaian program dengan kelompok sasaran; Pada capaian ini, program KOTAKU di Kecamatan Semarang Timur sudah tepat sasaran, di mana semua program yang dijalankan telah sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat di daerah tempat tinggalnya. Pada program KOTAKU terdapat 5 program, 1) program perbaikan kondisi bangunan untuk pemenuhan rumah layak huni. 2) program perbaikan jalan lingkungan untuk pemenuhan kualitas lingkungan. 3) penyediaan air minum untuk pemenuhan kebutuhan air masyarakat. 4) pemberian fasilitas pengelolaan sampah yaitu pemberian tong sampah.
 2. Kesesuaian program dengan pelaksana program; Pada aspek ini para fasilitator sudah menjalankan tugasnya dengan baik, terbukti dengan adanya penurunan capaian luas pemukiman kumuh dari 415,83 Ha menjadi 118,5 Ha. Melalui praktek kerja lapangan, tersedia fasilitator yang memiliki kesadaran kritis terhadap perkara kumuh, kesadaran kritis terhadap konsep KOTAKU dan fasilitator yang mempunyai keterampilan dasar fasilitasi.
 3. Kesesuaian kelompok sasaran dengan pelaksana program; Pada aspek ini pihak pelaksana program yaitu aparat pemerintah seperti Lurah, ketua RT, dan pihak fasilitator masih belum maksimal karena minimnya peran masyarakat, dikarenakan kurangnya sosialisasi pemerintah terkait program.
- b. Faktor pendorong dan penghambat dalam implementasi program KOTAKU di kecamatan Semarang Timur.
1. Masalah konten dan konteks kebijakan yang terjadi dalam pengimplementasian program KOTAKU. Sebagai pendukung berjalannya program, di tahun 2017 program KOTAKU mendapat dana sebesar 17,2

milyar dari APBN. Selain dukungan dana, program KOTAKU juga mendapatkan dukungan sumberdaya yang berasal dari masyarakat dan pihak pemerintah yang meliputi dinas Pekerjaan Umum, BAPPEDA Kota Semarang bidang perencanaan pengembangan wilayah.

2. Masalah yang terjadi dalam pengimplementasian program KOTAKU. Kurangnya partisipasi masyarakat secara aktif pada saat proses pendataan kawasan lingkungan dikarenakan kurangnya sosialisasi dari pihak pemerintah terkait adanya program KOTAKU.
3. Masalah kondisi lingkungan dalam pengimplementasian program KOTAKU. Kondisi masyarakat di kecamatan Semarang Timur rata – rata berada di bawah garis kemiskinan dengan mata pencaharian sebagian besar adalah buruh, sehingga partisipasi masyarakat terhadap

pelaksanaan program menjadi rendah.

3.2 Saran

1. Pada tahap perencanaan hendaknya ada kesempatan bagi masyarakat umum untuk mengikuti proses pendataan wiayah. Selama ini yang melakukan pendataan hanya ketua RT setempat yang mengakibatkan waktu yang cukup lama. Dengan adanya pelibatan masyarakat umum, maka diharapkan proses pendataan dapat berjalan dengan cepat.
2. Perlunya peningkatan partisipasi masyarakat secara menyeluruh, dalam hal ini maka pemerintah harus melakukan koordinasi langsung sekaligus perluasan dan intensitas sosialisasi kepada masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat yang turut terlibat aktif dapat lebih banyak dan menyeluruh.
3. Perlunya peningkatan pendampingan oleh pemerintah bagi masyarakat, hal ini untuk mensikapi kondisi masyarakat dengan kondisi rata-rata berada

di bawah garis kemiskinan dengan mata pencaharian sebagian besar adalah buruh. Melalui pendampingan yang intensif, dimaksudkan agar tercapai kesesuaian antara program dan kebutuhan masyarakat, atau sebaliknya.

4. Perlunya koordinasi yang intensif antar semua pihak, baik pihak pelaksana, pendamping maupun masyarakat sebagai penerima manfaat program KOTAKU. Adanya keseimbangan ketiga unsure, akan memaksimalkan pemanfaatan anggaran dan kualitas output kinerja program KOTAKU secara seimbang.

Pasolong, Harbani. 2007. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.

Peraturan Pemerintah No.14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Pemukiman.

SE DJCK No.40 / 2016 Tentang Pedoman Umum Program KOTAKU.

SK Walikota Semarang NO. 050/801/2014 Tentang Penetapan Lokasi Kumuh

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Syafiie, Inu Kencana. 2006. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta : Rineka Cipta

Tarigan, Henry Guntur. 2009. *Pengkajian Pragmatik*. Bandung: Angkasa.

Wahab, Abdul; Solichin. 2008. *Analisis Kebijakan dari Formulasi keImplementasi Kebijakan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara.

DAFTAR PUSTAKA

Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta: Gaya Media.

Keban, T. Jeremias. 2004. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori, Isu*. Yogyakarta: Grava Media.

Miles & Huberman. 2012. *Metodologi Penelitian Sosial Edisi Kedua*. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara.